

Generasi Z dan Dinamika Partisipasi Politik di Era Digital: Kajian Literatur Tentang Media Sosial, Literasi Politik, dan Demokrasi di Indonesia

Achmad Fahriel¹, Ahmad Alfarizi² Nasyi'atu Mumtazah³, Muhammad Ghofur⁴

¹²³⁴Universitas Darul' Ulum Lamongan

ARTICLE INFO

Keywords:

Generasi Z; partisipasi politik; media sosial; literasi politik; demokrasi digital

Article history:

Received 02-07-2026

Revised 12-07-2026

Accepted 27-07-2026

ABSTRACT

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana media sosial, literasi politik, dan pendidikan politik memengaruhi pola partisipasi politik Generasi Z di Indonesia, sekaligus memetakan tantangan berupa hoaks, disinformasi, polarisasi, dan apatisme politik yang menyertainya. Kajian ini disusun dengan metode tinjauan pustaka (literature review) terhadap empat belas artikel ilmiah nasional yang dipublikasikan pada rentang tahun 2022 hingga 2026, mencakup penelitian kualitatif, kuantitatif, maupun pengabdian kepada masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial berperan ganda: di satu sisi membuka ruang partisipasi politik digital yang lebih partisipatif dan egaliter, tetapi di sisi lain rentan menjadi sarana penyebaran hoaks, politik identitas, dan polarisasi. Personal branding politikus di media sosial turut membentuk persepsi pemilih pemula, sementara rendahnya literasi politik dan pendidikan politik formal masih menjadi faktor penghambat partisipasi yang kritis dan rasional. Di luar isu elektoral, Generasi Z juga menunjukkan peran strategis sebagai agen perubahan dalam isu hak asasi manusia, multikulturalisme, dan pembuatan kebijakan publik yang inklusif. Kajian ini merekomendasikan penguatan literasi digital dan pendidikan politik yang kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, partai politik, dan platform digital agar Generasi Z dapat berpartisipasi secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Achmad Fahriel

Universitas Darul' Ulum Lamongan, 2507118@mhs.unisda.ac.id

INTRODUCTION

Generasi Z, yaitu kelompok penduduk yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, merupakan generasi yang tumbuh bersama akselerasi teknologi digital dan menjadi kelompok demografis terbesar di Indonesia. Berdasarkan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik, gabungan pemilih muda dari kalangan Generasi Z dan Milenial diproyeksikan mendominasi lebih dari separuh populasi pemilih pada Pemilu 2024 (Yulianti et al., 2024). Dominasi demografis ini menjadikan Generasi Z sebagai kelompok strategis yang menentukan arah demokrasi Indonesia, baik melalui partisipasi elektoral maupun keterlibatan dalam isu-isu sosial dan kebijakan publik.

Sebagai digital native, Generasi Z tumbuh dengan keterikatan yang erat terhadap media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter (X), dan YouTube. Media sosial telah bertransformasi menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan generasi muda memperoleh informasi politik, menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, sekaligus memobilisasi gerakan sosial secara instan (Kadir, 2022). Fenomena ini melahirkan pola partisipasi politik digital yang berbeda dari generasi sebelumnya, di mana keterlibatan politik tidak lagi terbatas pada aktivitas konvensional, melainkan meluas ke ranah daring melalui konten kreatif, diskusi virtual, dan aktivisme berbasis tagar (Choeriyah & Assyahri, 2024).

Namun demikian, kedekatan Generasi Z dengan media sosial juga memunculkan sejumlah persoalan serius. Derasnya arus informasi digital membuka celah bagi penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, politik identitas, dan polarisasi opini yang dapat menurunkan kualitas demokrasi (Judijanto et al., 2024; Fadillah et al., 2025). Di sisi lain, sebagian Generasi Z justru menunjukkan sikap apatis dan skeptis terhadap politik karena memandang politik masih didominasi kepentingan elite, minim inovasi, dan sarat drama (Ramadhan et al., 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa akses teknologi yang luas tidak serta-merta menjamin partisipasi politik yang berkualitas apabila tidak diimbangi dengan literasi politik dan pendidikan politik yang memadai.

Berangkat dari kompleksitas fenomena tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana media sosial, literasi politik, dan pendidikan politik membentuk pola partisipasi politik Generasi Z di Indonesia, serta bagaimana generasi ini merespons tantangan hoaks, polarisasi, dan apatisisme politik. Selain aspek elektoral, artikel ini juga menelaah peran Generasi Z dalam isu-isu di luar kepemiluan, seperti penguatan kesadaran hak asasi manusia (HAM), multikulturalisme, dan keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan mensintesis temuan dari empat belas artikel ilmiah nasional, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai potensi dan tantangan Generasi Z sebagai aktor demokrasi di Indonesia.

METHODS

Artikel ini disusun menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari empat belas artikel ilmiah nasional yang dipublikasikan pada rentang tahun 2022 hingga 2026 melalui jurnal terakreditasi maupun prosiding seminar nasional, dengan tema besar partisipasi politik, literasi politik, media sosial, dan peran sosial-politik Generasi Z di Indonesia. Artikel-artikel tersebut mencakup ragam metode penelitian yang beragam, meliputi studi literatur/kepuustakaan, penelitian kualitatif deskriptif, kajian resepsi (reception studies),

survei kuantitatif dengan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS), penelitian korelasional, serta laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM).

Proses penyusunan artikel dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, identifikasi dan pengumpulan artikel sumber berdasarkan relevansi tema partisipasi politik Generasi Z. Kedua, ekstraksi data berupa identitas jurnal, metode penelitian, temuan, dan hasil penelitian dari setiap sumber. Ketiga, sintesis tematik (thematic synthesis) yang mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema besar, yaitu: (1) posisi demografis Generasi Z, (2) peran media sosial sebagai ruang publik dan sumber informasi politik, (3) personal branding dan persepsi pemilih pemula, (4) tantangan literasi politik berupa hoaks dan apatisme, (5) polarisasi politik dan pola penerimaan Generasi Z, (6) nilai personal, kepercayaan politik, dan alienasi politik, (7) peran Generasi Z dalam isu HAM, multikulturalisme, dan kebijakan publik, serta (8) strategi pendidikan politik sebagai solusi. Sintesis tematik ini digunakan untuk membangun narasi pembahasan yang koheren dan saling melengkapi antarsumber.

RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Generasi Z sebagai Kelompok Pemilih Strategis

Berdasarkan data sensus penduduk BPS, Generasi Z merupakan kelompok terbesar yang mendominasi populasi Indonesia, dengan gabungan pemilih muda dari Generasi Z dan Milenial diproyeksikan mencapai sekitar 60% pada Pemilu 2024 (Yulianti et al., 2024). Dominasi demografis ini menjadikan Generasi Z sebagai pilar penting yang menentukan arah kontestasi politik nasional maupun daerah. Meskipun memiliki antusiasme tinggi, pemilih pemula dari kalangan Generasi Z sering kali berada dalam posisi swing voters, yaitu kelompok yang keputusan politiknya belum matang dan mudah terpengaruh oleh dinamika lingkungan sekitar, tren media sosial, maupun praktik politik transaksional (Yulianti et al., 2024; Munawarah & Kristanto, 2022).

3.2 Media Sosial sebagai Ruang Publik dan Sumber Informasi Politik

Berbagai kajian sepakat bahwa media sosial telah menjelma menjadi ruang publik utama bagi Generasi Z dalam mengakses informasi, membentuk opini, dan berpartisipasi dalam wacana politik (Kadir, 2022; Sofiditiya & Candrasari, 2025; Ermawati, 2024). Penggunaan media sosial bahkan terbukti menjadi prediktor kuat yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik digital pemilih muda, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,502 ($p = 0,000$), sementara model penelitian mampu menjelaskan 63,4% varians partisipasi politik digital (Judijanto et al., 2024). Temuan ini menegaskan bahwa platform seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan YouTube tidak sekadar menjadi sarana hiburan, melainkan telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik generasi muda (Ermawati, 2024).

Meski demikian, dominasi media sosial sebagai sumber informasi politik membawa konsekuensi tersendiri. Ketergantungan yang tinggi terhadap algoritma platform digital, seperti halaman For You Page (FYP) di TikTok, dapat mengendalikan arah ketertarikan pemilih muda terhadap sosok politikus tertentu tanpa disertai verifikasi informasi yang memadai (Sofiditiya & Candrasari, 2025). Kondisi ini menuntut penguatan literasi digital agar generasi muda tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi politik, melainkan mampu bersikap kritis dalam menyaring kebenaran informasi yang diterima.

3.3 Personal Branding Politikus dan Persepsi Pemilih Pemula

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah kuatnya pengaruh personal branding politikus di media sosial terhadap persepsi pemilih pemula. Penelitian terhadap pemilih pemula Generasi Z di Kota Surabaya menunjukkan bahwa mayoritas informan mengenal sosok politikus dari konten media sosial dan menilai mereka berdasarkan citra yang ditampilkan, seperti keramahan, humor, dan kedekatan dengan masyarakat (Sofiditiya & Candrasari, 2025). Politikus yang aktif membangun citra positif di media sosial cenderung lebih mudah dikenal dan disukai oleh pemilih muda, meskipun sebagian pemilih tetap selektif dengan mempertimbangkan integritas, rekam jejak, dan program kerja yang relevan dengan kebutuhan masa depan mereka, seperti pendidikan dan lapangan kerja.

3.4 Tantangan Literasi Politik: Hoaks, Disinformasi, dan Sikap Apatis

Di balik potensi besar media sosial sebagai ruang partisipasi, hampir seluruh kajian yang ditelaah menyoroti tantangan literasi politik yang masih rendah di kalangan Generasi Z. Derasnya arus informasi digital membuat generasi muda kesulitan memilah informasi yang valid dari manipulasi politik, sehingga rentan terpapar hoaks, disinformasi, politik identitas, dan ujaran kebencian (Kadir, 2022; Fadillah et al., 2025; Judijanto et al., 2024). Studi di Kota Lhokseumawe misalnya mengidentifikasi tiga tantangan utama literasi politik Generasi Z, yaitu maraknya hoaks dan misinformasi, rendahnya kesadaran internal untuk mempelajari substansi politik, serta minimnya program pendidikan politik yang interaktif dari pemerintah maupun institusi pendidikan (Fadillah et al., 2025).

Rendahnya literasi politik ini turut berkontribusi pada sikap apatis dan skeptis sebagian Generasi Z terhadap dunia politik. Sikap tersebut umumnya dipicu oleh persepsi bahwa politik masih didominasi kepentingan elite yang korup, elitis, dan minim inovasi (Ramadhan et al., 2026). Sosialisasi pendidikan politik di tingkat akar rumput terbukti mampu menjadi solusi atas persoalan ini. Kegiatan sosialisasi terhadap anggota Karang Taruna di Desa Mekarmukti misalnya berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar politik, demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara, sekaligus mengurangi kecenderungan sikap apatis terhadap politik (Sjoraida & Nugraha, 2023).

3.5 Polarisasi Politik dan Pola Penerimaan Generasi Z

Isu polarisasi politik menjelang dan pascapemilu turut menjadi perhatian khusus dalam kajian ini. Studi resepsi (reception studies) berbasis teori Stuart Hall terhadap Generasi Z di Kota Surabaya menemukan bahwa mereka sepenuhnya menyadari potensi munculnya polarisasi politik akibat rekam jejak konflik Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 yang masih membekas (Fathurochman & Tutiasri, 2023). Penerimaan Generasi Z terhadap isu tersebut terbagi menjadi tiga posisi khalayak: dominant reading, yang menganggap polarisasi sebagai konsekuensi wajar dalam demokrasi; negotiated reading, yang menerima polarisasi sepanjang tidak berkembang menjadi konflik sosial; dan oppositional reading, yang menolak sepenuhnya polarisasi karena dinilai sengaja dimanfaatkan elite politik melalui politik identitas, hoaks, dan buzzer demi keuntungan elektoral jangka pendek (Fathurochman & Tutiasri, 2023).

Kemampuan literasi digital yang dimiliki Generasi Z sebagai digital native memungkinkan mereka melakukan verifikasi informasi secara mandiri (fact-checking) dan lebih berfokus pada rekam jejak serta program kandidat dibandingkan sekadar identitas pribadi. Meski demikian, kekhawatiran tetap muncul terkait budaya cancel culture dan

fanatisme pendukung yang berpotensi memperkeruh arus polarisasi (Fathurochman & Tutiasri, 2023).

3.6 Nilai Personal, Kepercayaan Politik, dan Alienasi Politik

Selain faktor media sosial dan literasi politik, partisipasi politik pemilih pemula juga dipengaruhi oleh nilai personal dan tingkat kepercayaan terhadap institusi politik. Penelitian korelasional terhadap 102 pemilih pemula di Kota Samarinda menemukan hubungan positif dan signifikan antara nilai personal serta kepercayaan politik dengan tingkat partisipasi politik (Munawarah & Kristanto, 2022). Semakin tinggi nilai personal dan kepercayaan seseorang terhadap sistem politik, semakin tinggi pula kecenderungannya untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik. Sebaliknya, sebagian pemilih pemula menunjukkan gejala alienasi politik, yaitu perasaan tidak percaya atau tidak memiliki keterikatan dengan sistem politik yang ada, yang berpotensi mendorong perilaku menarik diri dari proses demokrasi (Munawarah & Kristanto, 2022).

3.7 Peran Generasi Z dalam Isu HAM, Multikulturalisme, dan Kebijakan Publik

Kontribusi Generasi Z dalam kehidupan berdemokrasi tidak terbatas pada isu elektoral, tetapi juga meluas pada penguatan kesadaran hak asasi manusia dan multikulturalisme. Generasi Z tercatat memiliki empat peran strategis dalam meningkatkan kesadaran HAM, yaitu sebagai penggerak literasi HAM digital, agen perubahan dalam pendidikan HAM, pelopor advokasi HAM berbasis teknologi melalui petisi daring dan kampanye media sosial, serta mediator konflik dan promotor toleransi antarkelompok masyarakat (Purbasari et al., 2025). Sejalan dengan itu, Generasi Z juga dipandang sebagai agen perubahan yang mampu membangun solidaritas nasional, dialog antarbudaya, dan dialog antaragama guna mewujudkan harmoni di tengah masyarakat multikultural, dengan memanfaatkan ekosistem digital untuk memobilisasi kesadaran kolektif secara cepat lintas geografis (Ramadani, 2024).

Pada ranah kebijakan publik, Generasi Z menunjukkan perubahan paradigma keterlibatan politik yang lebih inklusif dan responsif dengan mengintegrasikan aksi digital dan aksi nyata. Generasi ini sangat vokal terhadap isu-isu progresif seperti kesetaraan gender, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan, serta cenderung menolak partisanisme ekstrem dan politik uang, dengan lebih menyukai pemimpin yang moderat, pragmatis, transparan, dan akuntabel (Choeriyah & Assyahri, 2024). Melalui aktivisme digital di platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter, Generasi Z berperan aktif mengawasi kebijakan pemerintah dan mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat (Choeriyah & Assyahri, 2024).

3.8 Pendidikan Politik sebagai Strategi Penguatan Partisipasi

Hampir seluruh kajian yang ditelaah menegaskan pentingnya pendidikan politik sebagai strategi kunci dalam memperkuat kualitas partisipasi politik Generasi Z. Pendidikan politik terbukti dapat meningkatkan pemahaman mengenai sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, kemampuan berpikir kritis, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital secara positif sebagai media pembelajaran politik (Lukman & Suhendar, 2025). Strategi pendidikan politik yang efektif perlu dilakukan secara kolaboratif melalui sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, partai politik, dan media sosial agar lebih sesuai dengan karakter Generasi Z yang akrab dengan dunia digital.

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat turut membuktikan efektivitas pendekatan ini. Seminar edukasi politik bagi pemilih pemula di lingkungan kampus, misalnya, berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai esensi pemilu bagi keberlangsungan demokrasi dan mendorong kesadaran akan posisi strategis mereka sebagai pemilih pemula (Yulianti et al., 2024). Demikian pula, pendekatan kurikuler interaktif seperti debat dan simulasi pemilu di sekolah terbukti mampu meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai sistem demokrasi, struktur pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara secara lebih praktis (Ramadhan et al., 2026). Temuan-temuan ini secara konsisten menegaskan bahwa kombinasi antara literasi digital yang kritis dan pendidikan politik yang inovatif merupakan kunci utama agar Generasi Z dapat bertransformasi dari sekadar objek menjadi subjek aktif dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

CONCLUSION

Berdasarkan sintesis terhadap empat belas artikel ilmiah nasional, dapat disimpulkan bahwa Generasi Z merupakan kelompok strategis dalam demokrasi Indonesia karena dominasi jumlahnya sebagai pemilih sekaligus kedekatannya dengan teknologi digital. Media sosial berperan sentral sebagai ruang publik yang membuka peluang partisipasi politik yang lebih partisipatif dan egaliter, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan berupa hoaks, disinformasi, politik identitas, dan polarisasi yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi. Personal branding politikus di media sosial turut membentuk persepsi pemilih pemula, sementara rendahnya literasi politik dan lemahnya kepercayaan terhadap institusi politik masih menjadi faktor penghambat partisipasi yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab.

Di luar ranah elektoral, Generasi Z juga menunjukkan peran strategis sebagai agen perubahan dalam penguatan kesadaran HAM, pembangunan harmoni multikultural, serta pengawalan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan pendidikan politik yang dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah, lembaga pendidikan, partai politik, dan platform digital menjadi langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan. Dengan pendekatan tersebut, Generasi Z diharapkan tidak hanya menjadi objek komoditas politik, melainkan mampu bertransformasi menjadi aktor utama yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam menciptakan sistem politik yang sehat, demokratis, dan bermartabat di Indonesia.

REFERENCES

- Choeriyah, N., & Assyahri, W. (2024). Keterlibatan Generasi Z dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Guna Mendekati Pelayanan yang Lebih Inklusif dan Responsif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)*, 2(2), 244–254.
- Ermawati. (2024). Peran Generasi Z dalam Menghadapi Dinamika Pemilu di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(6).

- Fadillah, F. H., Muzaffarsyah, T., Abdullah, T., & Zuhilmi. (2025). Literasi Politik Generasi Z Pada Pemilu Tahun 2024: Studi Pemilihan Legislatif di Kota Lhokseumawe. *Journal of Politics, Governance, and Administration (JPGA)*, 1(1), 33–42.
- Fathurochman, N. Y., & Tutiasri, R. P. (2023). Penerimaan Generasi Z terhadap Polarisasi Politik. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(9), 6837–6845. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2833>
- Judijanto, L., Wandan, H., Ayu, N., Triyantoro, A., & Suroso. (2024). Pengaruh Politik Identitas dan Penggunaan Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Digital Pemilih Milenial dan Gen Z di Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora (SISH)*, 2(1), 24–35. <https://doi.org/10.58812/sish.v2.101>
- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 198–211. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.11781>
- Lukman, D. V., & Suhendar, I. F. (2025). Pendidikan Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Gen-Z. *SEMAYO: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 33–42.
- Munawarah, R., & Kristanto, A. A. (2022). Alienasi Pemuda dalam Politik: Peran Nilai dan Kepercayaan Politik pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *PSIKOBORNEO: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(1), 32–50.
- Purbasari, D., Hasanudin, C., & Saputri, E. D. (2025). Peran Generasi Z dalam Meningkatkan Kesadaran HAM di Masyarakat Multikultural. *Prosiding Seminar Nasional Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset IKIP PGRI Bojonegoro*, 536–542.
- Ramadani, S. L. (2024). Generasi Z sebagai Agen Perubahan: Upaya Mencapai Harmoni di Tengah Multikulturalisme. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 4, 2026–2035.
- Ramadhan, S., Rosiana, M. Z., Febritama, M. I. R., & Ayu, N. K. (2026). Membangun Kesadaran Politik Di Kalangan Generasi Muda. *SALUT: Journal of Social and Education*, 2(2), 178–183.
- Sjoraida, D. F., & Nugraha, A. R. (2023). Upaya Peningkatan Pengetahuan Politik Melalui Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Z. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(2). <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i2.20>
- Sofiditiya, T., & Candrasari, Y. (2025). Persepsi Perilaku Pemilih Pemula (Generation-Z) pada Politikus Pemilu 2024. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 2(4), 615–628. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5715>

Achmad Fahriel, Ahmad Alfarizi, Nasyi'atu Mumtazah, Muhammad Ghofur, Generasi Z Dan Dinamika Partisipasi Politik Di Era Digital: Kajian Literatur Tentang Media Sosial, Literasi Politik, Dan Demokrasi Di Indonesia, 302-309

Yulianti, D. B., Dewi, D. S. K., & Djuwitaningsih, E. W. (2024). Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024: Membangun Kesadaran Politik pada Generasi Z. *MALLOMO: Journal of Community Service*, 5(1), 528–533.